

**KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN FKPM NAGARI  
TANJUNG BONAI DALAM UPAYA MENJAGA  
KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**DELFI KURNIAWAN**

**TM/NIM : 2010/55262**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Kemitraan Kepolisian dan FKPM Nagari Tanjung Bonai  
dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan**

Nama : **Delfi Kurniawan**

TM/NIM : 2010/55626

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

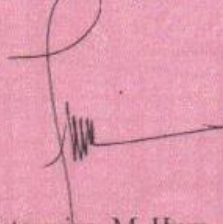
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Fatmariza, M. Hum  
NIP. 19660304 19103 2 001

Pembimbing II



Dr. Maria Montessori M. Ed. M. Si  
NIP. 19600202 198403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

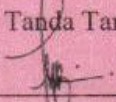
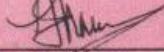
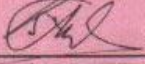
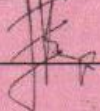
Pada hari Selasa 12 Januari 2016 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN FKPM NAGARI TANJUNG BONAI  
DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
MASYARAKAT**

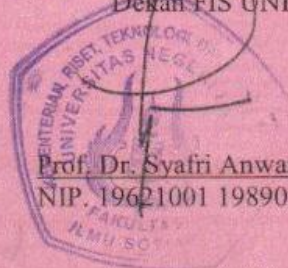
Nama : Delfi Kurniawan  
TM/NIM : 2010/55262  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2016

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Fatmariza, M. Hum	
Sekretaris	: Dr. Maria Montessori, M. ED., M. Si	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delfi Kurniawan

Nim/Tahun Masuk : 55262/2010

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Kemitraan Kepolisian dan FKPM Nagari Tanjung Bonai dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 14 Januari 2015

Saya yang Menyatakan



DELFI KURNIAWAN  
NIM. 55262/2010

## ABSTRAK

### **Delfi kurniawan: NIM 2010/97274. KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN FKPM NAGARI TANJUNG BONAI DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masi kurang kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. bertujuan untuk melihat bagaimanaperan Kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian apa saja yang menghambat Kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta bagaimana upaya Kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Polsek Lintau Buo Utara dan FKPM Nagari Tanjung Bonai. Hasil penelitian ini menggambarkan Kemitraan Kepolisian dan FKPM di Nagari Tanjung Bonai. kemitraan kepolisian dan FKPM terjadi dalam beberapa hal seperti penyelesain masalah pencurian, sabung ayam, dan KDRT. meskipun demikian kemitraan ini belum dapat berjalan optimal karena hambatan-hambatan kurangnya jumlah personil polisi dan FKPM yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya dukungan masyarakat. sejauh ini polisi dan FKPM sudah melakukan upaya penegakan hukum dan penjaminan masyarakat Nagari Tanjung Bonai di antaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melalui sekolah, mesjid dan tempat umum.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Kemitraan Kepolisian dan FKPM Nagari Tanjung Bonai dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat )”**. Tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ibuk Dr. Fatmariza, M. Hum selaku pembimbing I dan Ibuk Dr. Maria Montessori, M. Ed, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibuk Dra. Aina, M. Pd, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S. Pd, M. Pd. Ibuk Estika Sari, SH selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.

4. Ketua jurusan ISP Ibuk Dr.Maria Montessori,M,Ed,M.Si dan Ibu Sekretaris Jurusan Ibuk Dr.Fatmariza, M. Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Penasehat Akademis penulis Ibuk Estika Sari,SH yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
6. Dekan beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Instansi Pemerintahan yang bersangkutan di Kabupaten Tanah Datar.
7. Polres Lintau Buo Utara dan FKPM Nagari Tanjung Bonai beserta masyarakat Nagari Tanjung Bonai dalam membantu penulis skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuanganJurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, 14 Desember 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis	
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	12
2. Tugas, wewenang dan Fungsi Kepolisian.....	14
3. Struktur Organisasi Kepolisian.....	19
4. Pengertian FKPM .....	24
5. Hambatan-hambatan Kepolisian dan FKPM.....	27
6. Upaya Kepolisian dan FKPM .....	28
B. Kerangka Konseptual.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Jenis data dan sumber data Penelitian.....	35
D. Informan penelitian.....	35
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	36
F. Teknik penguji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik dan Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum	
1. Gambar umum Lokasi Penelitian .....	41
2. Letak Geografis .....	41
3. Penduduk .....	42
4. Mata Pencarian.....	43
5. Pendidikan.....	44
6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
7. Visi Dan Misi Polsek.....	46
8. Job Description.....	47
9. Petugas Yang Berkaitan Dengan Polsek.....	48
10. Struktur Organisasi Polsek.....	50
11. Gambar umum lokasi penelitian.....	51
12. Tugas,wewenang dan visidan misi FKPM.....	52
13. Sarana prasarana FKPM.....	52

14. Petugas yang berkaitan dengan FKPM.....	53
15. Struktur Organisasi FKPM.....	54
B. Temuan Khusus	
1. Peran kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan keteban dalam masyarakat .....	55
2. Hambatan-Hambatan Kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat .....	61
3. Upaya-Upaya Kepolisian dan FKPM dalam menjaga Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.....	66
C. Pembahasan	
1. Peran kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.....	68
2. Hambatan-Hambatan Kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat .....	71
3. Upaya-Upaya Kepolisian dan FKPM dalam menjaga Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.....	74
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Data kejahatan selama Tahun 2013 .....	7
Tabel 2 Data Informan Penelitian .....	36
Tabel 3. Jumlah Penduduk Nagari Tanjung Bonai.....	42
Tabel 4 Jumlah penduduk yang melaporkan kejahatan.....	43
Tabel 5 Mata pencaharian masyarakat Nagari Tanjung Bonai.....	44
Tabel 6 Jenjang Pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Bonai.....	45
Tabel 7 Anggota PolsekLintau Buo Utara.....	48
Tabel 8 Sarana prasarana FKPM.....	52
Tabel 9 Anggota FKPM Nagari Tanjung Bonai.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 2 Struktur organisasi.....	50
Gambar 3 Struktur organisasi.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Izin Pengambilan Data .....
Lampiran Surat Izin Penelitian .....
Lampiran Surat Keterangan telah melakukan penelitian .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan perkataan lain baik secara reventif maupun refresif. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.hal tersebut di tegas dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002,bahwa tugas kepolisian sebagai penegak hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Aparat kepolisian merupakan aparatur negara dalam penegakan hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Menurut Soerjono Soekanto( 1983 : 143 ) meyakini bahwa aparat kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam

kerja sama polisi dengan masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat.

Pemerintah selalu menjaga dan mengawasi segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang siap menerima serta menindak lanjuti laporan maupun pengaduan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap laporan atau pengaduan tersebut agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan segala aktifitas.

Pada dasarnya fungsi dari setiap polisi sebenarnya ada tiga, yaitu legalitas, keadilan, dan ketertiban. Kepolisian tidak boleh bertindak sewenang-wenang terlebih lagi anti demokrasi, karena mereka dituntut untuk tanggap terhadap pendapat umum dan turut bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Peran masyarakat dalam membantu ketertiban dan keamanan sangat perlu karna masyarakat yang lebih tau apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat dan masalah-masalah apa yang terjadi di dalam masyarakat dan oleh karna itu agar terlaksana keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat maka peran masyarakat sangat penting dalam membantu aparat kepolisian.

Dengan kerja sama polisi dan masyarakat maka apapun yang terjadi di masyarakat seperti keamanan, keyamanan dan ketertiban bisa dihindarkan dalam masyarakat tersebut, contoh nya gangguan Keamanan dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat, maka polisi

berkerja sama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan *Skep Kapolri No Pol/737/2005* bahwa FKPM merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Dilihat dari segi organisasinya, FKPM merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Tugas dan wewenang yang diemban oleh FKPM adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Uraian tugas yang akan dilakukan oleh FKPM adalah : 1) Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. 2) Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian

umum dan fungsi bimbingan/ penyuluhan. 3). Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dalam menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahan. 4). Membahas dan menetapkan program kerja tahunan/ triwulan dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan. 5) Menindaklanjuti program kerja yang telah dibuat, kalau perlu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait dalam perwujudannya. 6) Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga. 7) Menampung keluhan/ pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/ pelanggaran dan permasalahan kepolisian serta membahasnya bersama petugas polmas untuk mencari jalan keluarnya. 8) menampung dan membahas keluhan/ pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

Kemudian wewenang yang melekat pada FKPM adalah 1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya. 2) Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam

hal terjadi kejahatan/ tindak pidana dengan tertangkap tangan. 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/ peningkatan kualitas keamanan/ ketertiban lingkungan. 4) Menegakkan peraturan lokal sebagaimana yang ada dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan/ pertikaian antar warga yang dilakukan petugas Polmas.

Bagi masyarakat Minangkabau yang berperan sebagai Polisi masyarakat itu sebut dengan sebutan Hulu Balang. Hulu Balang merupakan salah satu pemangku adat dan bertugas sebagai staf pembantu penghulu. Dalam filsafah Minang Hulu Balang disebut “ *Nan bamato nyalang talingo nyariang, mamakai usuah jo pareso, tahu di sumbang dengan salah, parik paga dindiang nan kokoh, maampang lalu ka subarang, mandindiang sampai ka langik, manjago cabuah koknyo tumbuhan, sia baka maliang jo cilok, manjago barih kok talampau*” (Yang bermata tajam bertelinga nyaring, memakai usul dan periksa, tahu akan sumbang dan salah, parit pagar dinding yang kokoh, mengempang sampai ke seberang, mendinding sampai ke langit, menjaga cabul jangan terjadi, siar bakar maling dan curi, menjaga garis jangan terlanggar).

Supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya FKPM tidak mengalami kendala dan kesulitan, apalagi kendala kultural di tengah masyarakat, seyogyanya FKPM bisa hadir dan memerankan diri sesuai dengan pranata sosial kultural yang

berlaku. FKPM tidak dibenarkan berperilaku arogan dan kepolisi-polisian yang tak menentu. Pengurus FKPM di semua nagari harus melakukan pendekatan persuasif kepada semua lapisan masyarakat dan melakukan komunikasi dengan semua pemuka masyarakat terutama kepada ninik mamak. Sehubungan FKPM merupakan lembaga baru yang mengemban tugas strategis untuk penciptaan keamanan di setiap nagari, maka langkah pertama yang harus dilakukan setiap pengurus adalah melakukan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat tentang keberadaan FKPM, serta tugas-tugas dan wewenang yang diembannya. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan FKPM dengan semua tugas dan wewenangnya merupakan awal dari pelaksanaan tugas. Ini sangat penting, karena kalau masyarakat belum (tidak) menerima keberadaan FKPM, akibatnya jangankan akan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, justru akan menambah permasalahan di tengah masyarakat. Legitimasi pengurus dari yang memberikan SK itu penting, namun lebih penting lagi bagaimana legitimasi dari masyarakat terhadap personil yang ada di FKPM, bagaimana *track recordnya*, bagaimana tingkah lakunya selama ini.

Kemudian FKPM akan berdaya dan berwibawa di tengah masyarakat, kalau pihak kepolisian memberikan kepercayaan kepada FKPM sepenuhnya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Tapi

kalau terlalu diintervensi, maka hasilnya “*wujuduhu ka ‘adamih*” (adanya FKPM sama seperti tidak adanya). Jangan FKPM ada dan muncul pas pada acara-acara kedatangan pejabat-pejabat dari kepolisian

Dari data yang di dapat dan hasil wawancara penulis dengan menunjukkan hasil bahwa masih ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Nagari Tanjung Bonai di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**

**Data kejahatan Selama Tahun 2013 di Nagari Tanjung Bonai**

No	Data kejahatan		
	Tahun 2013	Kejahatan	%
1	Poligami	10	8 %
2	Judi	20	20 %
3	Perkelahian	15	15 %
4	Cabul	5	5 %
5	Sabung ayam	10	10 %
<b>60 kejahatan</b>			

Sumber : Polsek Lintau Buo Utara Tahun 2013

Dari tabel di atas, diketahui bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran dari tahun 2013 sebanyak 60 kejahatan di Nagari Tanjung Bonai dan pelanggaran paling banyak judi dan poligami.

Oleh karena ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat masyarakat yang tidak aman dan nyaman yang bisa mengganggu setiap hari masyarakat dalam setuasi yang tidak tentram dalam kehidupan sehari-hari melakukan aktivitas nya di tengah-tengah masyarakat tersebut, Dengan peran Polisi yang dibantu FKPM maka apapun yang terjadi di masyarakat bisa dulu di

tindak lanjuti oleh FKPM sebelum sampai di Polisi permasalahan terjadi di masyarakat yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari .

Maka dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kepolisian beserta FKPM harus bekerja sama dalam menegakan keamanan dan ketertiban di masyarakat supaya terwujud nya kehidupan yang aman di dalam masyarakat tersebut karna ada bantuan di dalam masyarakat seperti FKPM maka Polisi bisa mengatasi masalah-masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat masyarakat tidak nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk melanjutkan kehidupannya

Berdasarkan uraian diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul : **KEMITRAAN KOPOLISIAN DAN FKPM NAGARI TANJUNG BONAI DALAM UPAYA MENJAGA DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**”

## **A. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi masalah**

Berdasarkan penjabaran masalah yang ada dalam latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Masih Cukup banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lintau
2. Masih Kurang nya pemahaman masyarakat tentang polisi menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Masih Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan pemahaman di masyarakat.
4. Belum optimalnya polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Masih belum optimal nya kerja FKPM dan kepolisian.

#### **b. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Kemitraan Kepolisian dan FKPM dengan Masyarakat Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Nagari Tanjung Bonai.

#### **C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini tidak keluar dari fokus yang telah ditetapkan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama masyarakat?
2. Habatan-hambatan kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
3. Upaya kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana peran kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama masyarakat.

2. Hatan-hambatan kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
3. Bagaimana upaya kepolisian dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

#### **D.Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sesuai dengan ilmu pengetahuan maka penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan, hukum acara pidana, hukum pidana, kriminologi, dan lain-lain.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Aparat kepolisian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan pada aparat kepolisian dan FKPM sebagai penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga hak masyarakat dalam penegakan hukum dapat terpenuhi secara adil.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum itu apa sebenarnya hukum dan membuat masyarakat mengetahui hukum.

c. Bagi Peneliti

Sebagai penambah ilmu di bidang hukum, khususnya mengenai kemitraan kepolisian dan FKPM dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Polisi dan FKPM dalam kemitraan di Nagari Tanjung Bonai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat yang di lakukan sudah baik tetapi kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum yang berlaku di dalam masyarakat belum sadar dengan hukum dan masi ada juga masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut .
2. Polisi bersama FKPM di Nagari Tanjung Bonai sudah bekerja keras melalui sosialisasi yang dilakukan dalam masyarakat akan membuat masyarakat sadar dengan kepatuhan hukum yang berlaku.
3. Hamabatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian beserta FKPM dalam menjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat yaitu seperti kurangnya jumlah personil kepolisian , sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi , kurangnya dukungan dari masyarakat dalam penegakan hukum atau tidak adanya partisipasi masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penegakan hukum di saat polisi membutuhkan bantuan dari pihak masyarakat, walaupun sudah dibantu FKPM yang anggota masi kurang dalam membantu Polisi.

4. Upaya yang dilakukan kepolisian bersama FKPM untuk menanggulangi hambatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari Tanjung Bonai adalah dengan menambah jumlah personil, melengkapi sarana dan prasarana, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat serta kerjasama dengan Perangkat masyarakat agar tau apapun masalah yang terjadi di masyarakat, dalam upaya terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Masyarakat Nagari Tanjung Bonai berpandangan terhadap polisi dan FKPM sudah bagus menjalankan tugas nya tetapi harus ada kerja sama dengan masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Polisi dan FKPM yang berkarakter terpuji yang dapat menempatkan diri sebagai seorang moralis, bapak, teman, pengabdian, dan tokoh yang dikagumi dan dihormati. Artinya kemulyaan martabat dan kehormatan anggota Polri dapat di lihat dari besarnya penghargaan dan pengakuan masyarakat terhadap profesinya dan terwujud masyarakat yang aman dan damai beserta tentram.

## **B. Saran**

Di harapkan kepada Polisi dan FKPM harus menyiapkan jajaran yang bersih terlebih dahulu sebagai landasan keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan juga harus ada kerja sama yang baik dengan FKPM dalam membantu kerja polisi di masyarakat serta melakukan sosialisasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal

ini mungkin harus dimulai dari proses rekrutmen yang bersih sehingga jajaran petugas yang terbentuk melindungi, mengayomi dan melayani dan menegakkan hukum di dalam masyarakat serta pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi hukum.

1. Diharapkan kepada polisi dan FKPM dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat harus ada kerja sama dengan masyarakat agar tau apapun yang terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang hukum dengan masyarakat supaya bisa terwujud kehidupan yang aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat.
2. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian serta FKPM Nagari Tanjung Bonai maka saya berharap:
  - 1) Diharapkan kepada institusi kepolisian dan FKPM agar lebih mengoptimalkan jumlah personilnya sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah polisi dengan jumlah masyarakat sertamelakukan sosialisasi hokum dala masyarakat agar sadar dengan hokum yang berlaku di masyarakat.
  - 2) Diharapkan kepada pemerintah agar melengkapi sarana dan prasarana kepolisian dan FKPM, sehingga kepolisian bersama FKPM lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
  - 3) Diharapkan kepada masyarakat agar lebih percaya kepada pihak kepolisian Serta FKPM dan lebih mendukung kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Masyarakat mengharapkan kepada kepolisian dan FKPM adalah tentang peningkatan peran dan fungsi polisi beserta FKPM dan mengadakan sosialisasi tentang hukum yang berlaku untuk menjaga masyarakat yang aman dan tentram agar terwujud nya kehidupan yang aman dan tentram serta harus ada keraja sama polisi beserta FKPM,Wali Nagari,Jorong,ketua pemuda dan niniak mamak agar apapun masalah bisa tau Polisi secepat nya.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bibit Samad Rianto. 2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Indrawijaya. I Adam. 1986. *Perilaku Organisasi*, Cetakan Ketiga, Sinar Baru, Bandung.
- Jalaluddin Rahmad. 2005. *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Jimly ashidique, penegakan hukum, <http://www.docudesk.com>
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- LJ. Van Apeldorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad, Farouk. *Menuju Reformasi POLRI*. Jakarta : PTIK Press. 2003.
- Mulyana, Deddy. (2002). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- R. abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Rianegara, M.D. (2010). *Upaya Polri dalam mensosialisasikan Undangundang nomor 22 tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas*. Malang : Universitas Brawijaya.
- S. sahabuddin. 2000. *Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Selaku Penegak Hukum Di Kota Media Jambi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Santoso, A dkk. (2009). *Oase menyejukkan ditengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru , hal. 15
- Sholeh so'an, *moral penegak hukum di indonesia, (pengacara, hakim, polisi, jaksa)*, agung mulia, 2004.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Perseda.